



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RONALD JACKSON SIMBOLON**
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALLAN TANDIONO**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

Pihak Pertama,

RONALD JACKSON SIMBOLON
NIP 197903032005021002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Perjanjian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Perjanjian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026 merupakan penetapan terhadap rencana pencapaian sasaran dan indikator kinerja program kerja tahun 2026 yang dijabarkan dari Dokumen Rencana Strategis tahun 2025 - 2029 Balai Pengujian Perkeretaapian, dokumen anggaran serta tugas pokok dan fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian. Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja tersebut memuat penyelenggaraan program kerja dan kegiatan serta pengukuran keberhasilan target kinerja, pencapaian tujuan, sasaran Balai Pengujian Perkeretaapian dengan mempertimbangkan sumber daya (anggaran) pada dokumen DIPA dan POK Tahun Anggaran 2026.

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 selanjutnya dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Bekasi, Januari 2026

KEPALA BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN



RONALD JACKSON SIMBOLON, ST., MT.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197903032005021002

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian	3
D. Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian	4
E. Sumber Daya Manusia	8

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

A. Tujuan dan Sasaran	12
B. Arah Kebijakan dan Strategi	12
C. Indikator Kinerja Kegiatan	14
D. Program dan Kegiatan	20

BAB III : RENCANA KINERJA BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

A. Pengukuran Indikator Kinerja	21
B. Target Perjanjian Kinerja	23
C. Alokasi Anggaran Tahun 2026	28

BAB IV : PENUTUP 30

LAMPIRAN A : Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026

LAMPIRAN B : Perjanjian Kinerja Tahun 2026

LAMPIRAN C : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026 Berdasarkan Seksi dan Sub Bagian	9
Tabel 1.2	Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 1.3	Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026 Berdasarkan Golongan/Kepangkatan	11
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029	14
Tabel 2.2	Analisis SMART Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026	16
Tabel 3.1	Perhitungan Indikator Kinerja	21
Tabel 3.2	Perjanjian Kinerja berdasarkan Target Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026	23
Tabel 3.3	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian	5
Gambar I.2	Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026 Berdasarkan Sub Bagian dan Seksi	9
Gambar I.3	Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Gambar I.4	Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026 Berdasarkan Golongan/Kepangkatan	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu kewajiban setiap instansi Pemerintah termasuk tingkat Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat penetapan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun berdasarkan indikator kinerja (*performance indicators*) yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis.

Perjanjian Kinerja selanjutnya ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian sasaran dan indikator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2026 dengan mempertimbangkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, capaian periode sebelumnya serta beberapa aspek sumber daya antara lain pembiayaan/anggaran, sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Dari ketiga aspek ini yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan kinerja, maka pada tahun 2026 ini Balai Pengujian Perkeretaapian menetapkan program kerja berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 56 Tahun 2023 yang akan ditetapkan sebagai acuan Perjanjian Kinerja yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran;
2. melaksanakan pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian;
3. melaksanakan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian;
4. melaksanakan pengujian kecakapan dan keahlian sumber daya manusia bidang perkeretaapian;
5. melaksanakan pengujian komponen, sistem serta peralatan pendukung prasarana dan sarana perkeretaapian lainnya;
6. melaksanakan analisis isu actual perkembangan perkeretaapian;
7. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pelaksanaan pengujian perkeretaapian;
8. melaksanakan pemeriksaan intern;

9. melaksanakan urusan pengembangan usaha, pemasaran, dan kerja sama; dan
10. melaksanakan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, ketatausahaan, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik Negara, serta evaluasi dan pelaporan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan renstra, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran;
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja mencakup lembar pernyataan pimpinan, penetapan sasaran, indikator kinerja, target kinerja serta perubahan alokasi anggaran dan rencana aksi. Perjanjian Kinerja selanjutnya ditetapkan sebagai target pencapaian sasaran dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2026 dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Tahun 2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Maksud penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam waktu satu tahun kedepan sebagai acuan kerja yang menjadi perjanjian kerja dari instansi pemerintah sebagai tahapan ke arah terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber-sumber yang menjadi kewenangannya.

2. Tujuan:

- a. adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya, dana, waktu dan lain-lain yang menjadi kewenangannya.
- b. adanya peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik.
- c. adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah.
- d. percepatan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
- e. untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah.

1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian

Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta susunan organisasi Kementerian Negara, dipandang perlu sebagai landasan dan acuan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 4 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang di dalamnya terdapat unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang secara legalitas membawahi 5 Direktorat Teknis, 1 Sekretariat Jenderal Perkeretaapian, 1 Inspektorat Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli, serta beberapa Kepala Pusat.

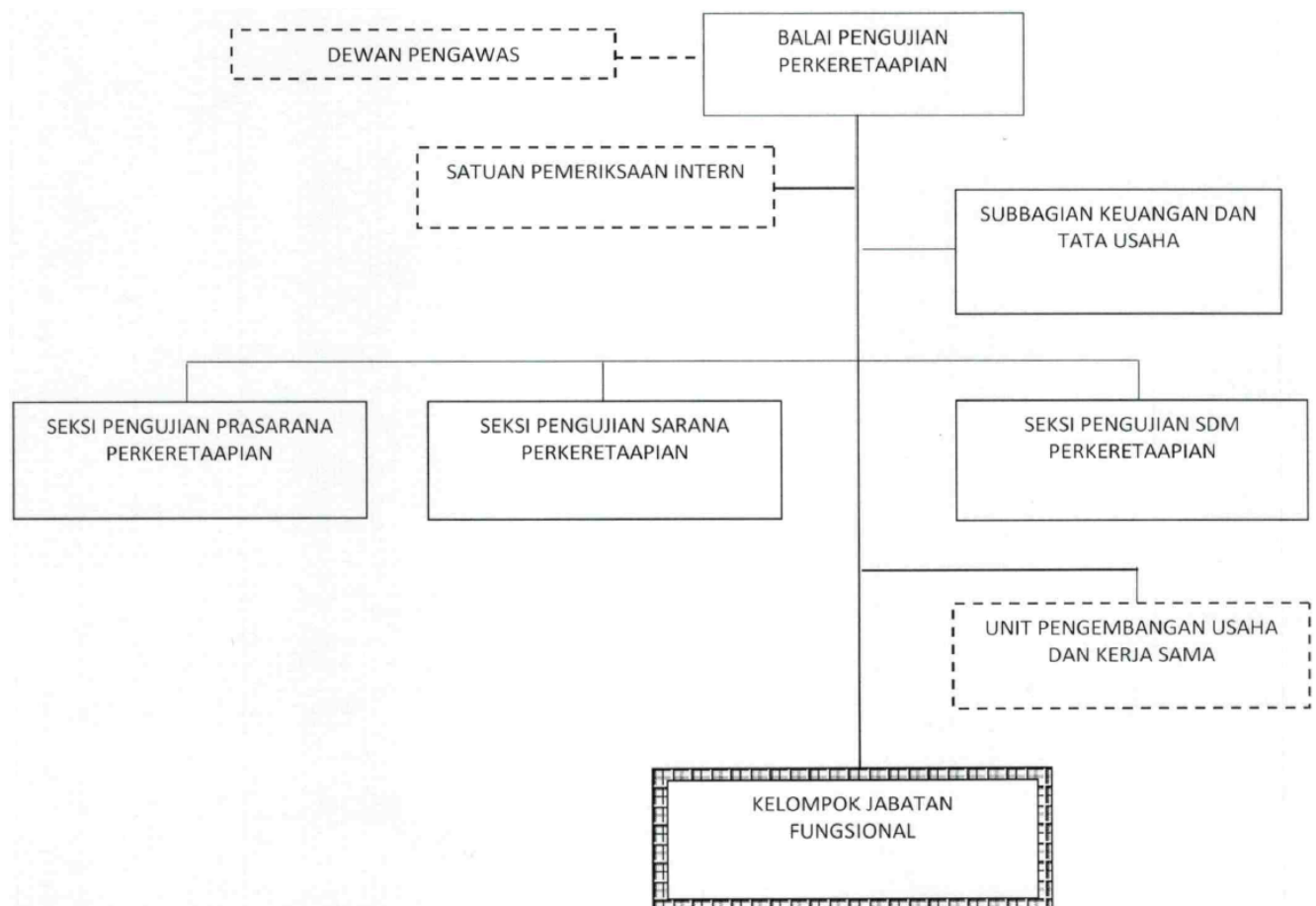
Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian melaksanakan tugas pokok dan fungsi nya, antara lain:

1. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran;
2. pelaksanaan pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian;
3. pelaksanaan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian;
4. pelaksanaan pengujian kecakapan dan keahlian sumber daya manusia bidang perkeretaapian;

5. pelaksanaan pengujian komponen, sistem serta peralatan pendukung prasarana dan sarana perkeretaapian lainnya;
6. pelaksanaan analisis isu actual perkembangan perkeretaapian;
7. pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pelaksanaan pengujian perkeretaapian;
8. pelaksanaan pemeriksaan intern;
9. pelaksanaan urusan pengembangan usaha, pemasaran, dan kerja sama; dan
10. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, ketatausahaan, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik Negara, serta evaluasi dan pelaporan.

1.4 Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian

Struktur organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi terdiri atas Subbagian Keuangan dan Tata Usaha, Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian, Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian, Seksi Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian, Satuan Pemeriksaan Intern; Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama; dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana bagan berikut ini :



Gambar I.1 Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian

1. Subbagian Keuangan dan Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, ketatausahaan, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pengujian perkeretaapian.

Subbagian Keuangan dan Tata Usaha terdiri atas :

- Arsiparis Ahli Pertama;
- Perencana Ahli Pertama;
- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama;
- Pranata Komputer Ahli Pertama;

- e. Statistisi Ahli Pertama;
- f. Penelaah Teknis Kebijakan;
- g. Penata Layanan Operasional;
- h. Pengelola Layanan Operasional;
- i. Pengadministrasi Perkantoran;
- j. Petugas Keamanan; dan
- k. Pramubakti.

2. Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian

Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian, pengujian komponen, sistem dan peralatan pendukung lainnya, pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pengujian sarana perkeretaapian, serta analisis isu aktual perkembangan sarana perkeretaapian.

Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian mempunyai jabatan pelaksana dan fungsional yang membantu mencapai tugas Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian dengan rincian sebagai berikut :

- Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Ahli Muda;
- Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil;
- Pengawas Transportasi Perkeretaapian;
- Teknisi Perkeretaapian;
- Penata Layanan Operasional;
- Petugas Transportasi Perkeretaapian;
- Pengelola Layanan Operasional; dan
- Pengadministrasi Perkantoran.

3. Seksi Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

Seksi Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan pengujian kecakapan dan keahlian sumber daya manusia bidang perkeretaapian, pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pengujian sumber daya manusia perkeretaapian.

Seksi Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian mempunyai jabatan pelaksana yang membantu mencapai tugas Seksi Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian yaitu :

- a. Penguji Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
- b. Petugas Transportasi Perkeretaapian;
- c. Teknisi Perkeretaapian;
- d. Penata Layanan Operasional;
- e. Pengelola Layanan Operasional; dan
- f. Pengadministrasi Perkantoran.

4. Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian

Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian, pengujian komponen, sistem dan peralatan pendukung prasarana lainnya, pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pengujian prasarana perkeretaapian, serta analisis isu aktual perkembangan prasarana perkeretaapian.

Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian mempunyai jabatan pelaksana dan fungsional yang membantu mencapai tugas Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Ahli Muda;
- b. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Ahli Muda;
- c. Teknik Jalan dan Jembatan Terampil;
- d. Pengawas Transportasi Perkeretaapian;
- e. Teknisi Perkeretaapian; dan
- f. Pengadministrasi Perkantoran.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mmeberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional..

Adapun penjabaran tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Penguji Sarana Perkeretaapian memiliki tugas jabatan yaitu melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian;
- b. Penguji Prasarana Perkeretaapian memiliki tugas jabatan yaitu melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian;
- c. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian memiliki tugas jabatan yaitu melaksanakan dukungan operasional pengukuran pada pengujian sarana perkeretaapian; dan
- d. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian memiliki tugas jabatan yaitu melaksanakan dukungan operasional pengukuran pada pengujian prasarana perkeretaapian.

6. Satuan Pemeriksaan Intern

Satuan Pemeriksaan Intern selanjutnya disebut SPI merupakan unsur pemeriksa yang menjalankan tugas pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPI terdiri atas kepala dan anggota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

7. Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama

Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha, pemasaran, dan kerja sama. Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama terdiri atas kepala dan anggota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

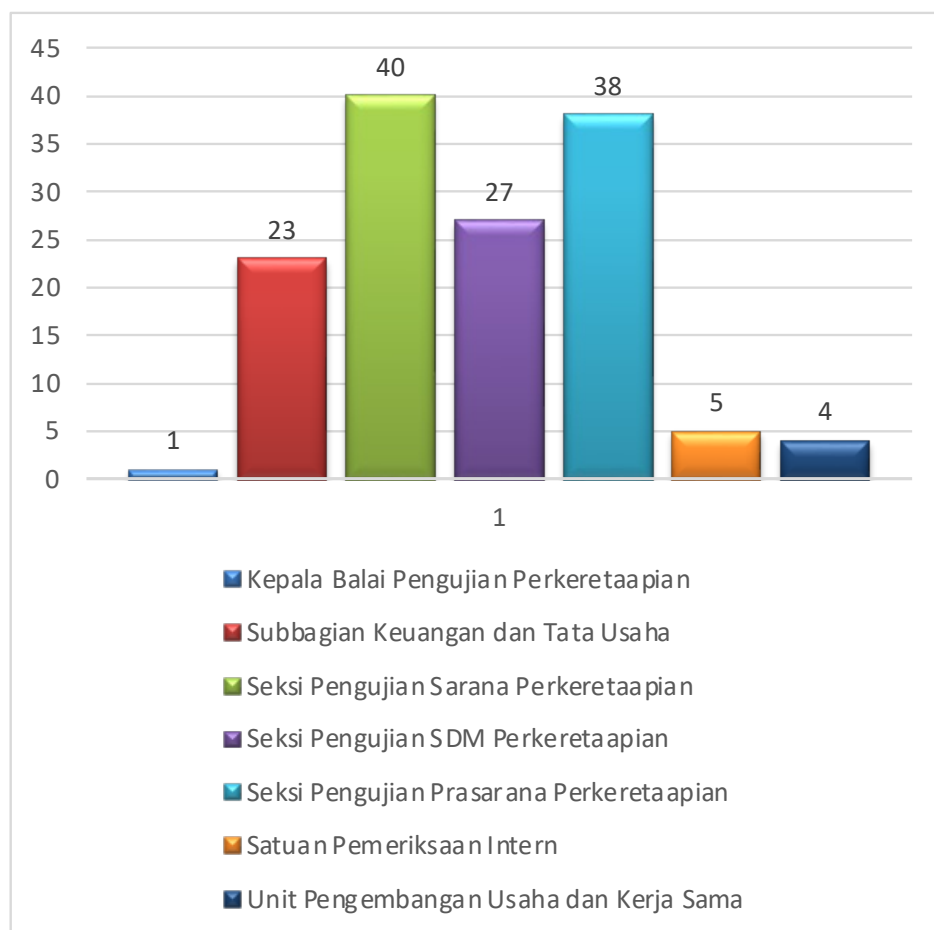
1.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Balai Pengujian Perkeretaapian secara keseluruhan per Bulan Januari Tahun 2026 berjumlah sebanyak 138 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jumlah SDM berdasarkan Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian, terbagi atas :

Tabel 1.1
Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026
Berdasarkan Seksi dan Sub Bagian

SUBBAGIAN DAN SEKSI	JUMLAH
Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian	1
Subbagian Keuangan dan Tata Usaha	23
Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian	40
Seksi Pengujian SDM Perkeretaapian	27
Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian	38
Satuan Pemeriksaan Intern	5
Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama	4
TOTAL	138

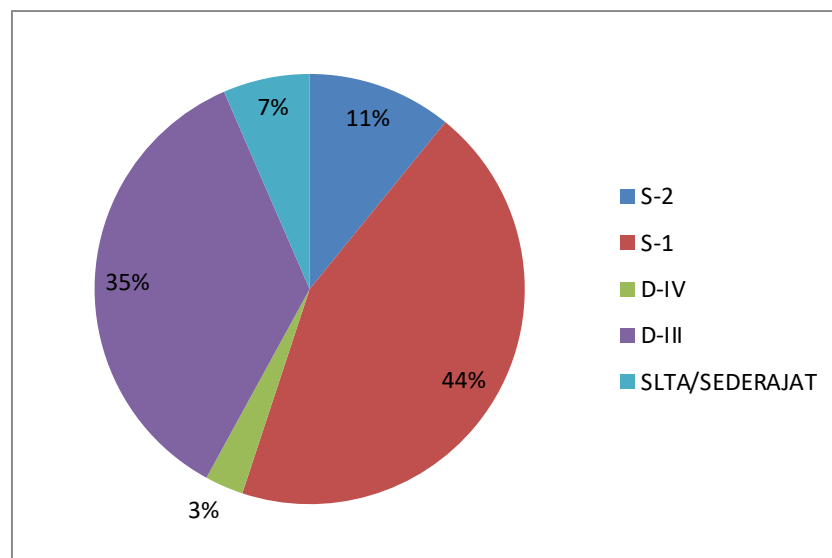


Gambar 1.2
Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026
Berdasarkan Sub Bagian dan Seksi

- 2) Jumlah SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian, terbagi atas :

Tabel 1.2
Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1	S-2	15
2	S-1	61
3	D-IV	4
4	D-III	49
5	SLTA/SEDERAJAT	9
TOTAL		138

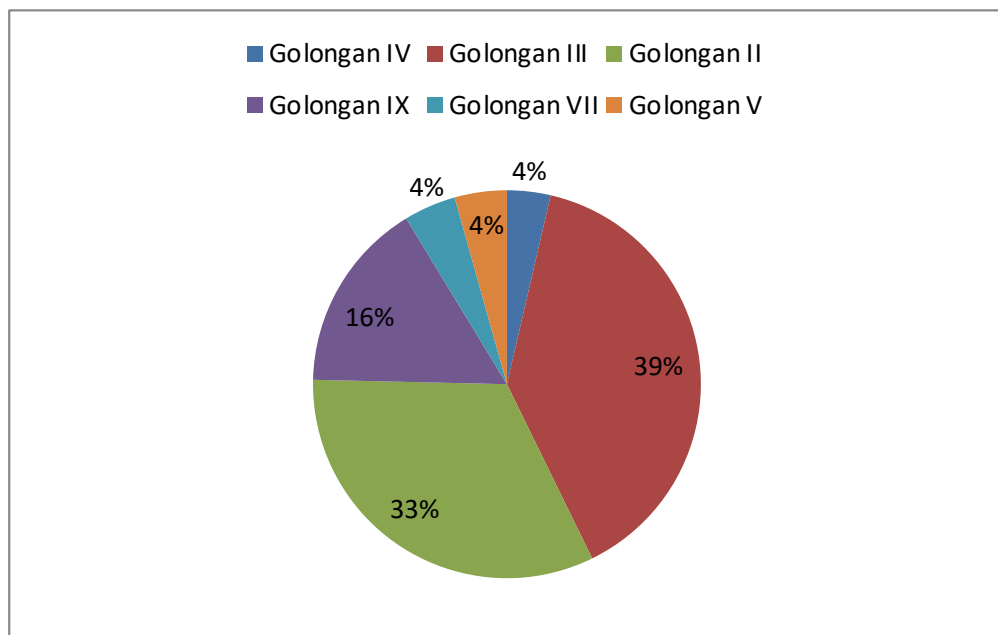


Gambar 1.3
Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- 3) Jumlah SDM berdasarkan Golongan/Kepangkatan di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian, terbagi atas :

Tabel 1.3
Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026
Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	GOLONGAN / KEPANGKATAN	JUMLAH (Orang)
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	54
3	Golongan II	45
4	Golongan IX	22
5	Golongan VII	6
6	Golongan V	6
TOTAL		138



Gambar 1.4
Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026
Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

BAB II

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

A. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029, visi Balai Pengujian Perkeretaapian adalah Terwujudnya Balai Pengujian Perkeretaapian yang Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam upaya mencapai visi Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 – 2029 tersebut, Balai Pengujian Perkeretaapian memiliki misi sebagai berikut :

1. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan pengujian perkeretaapian nasional;
2. Meningkatkan pelaksanaan dan pengelolaan pengujian perkeretaapian guna mendukung transformasi perkeretaapian yang maju;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan yang terintegrasi dan sinkron pada lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian.

Berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian serta mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 termasuk *cascading* sasaran program, Balai Pengujian Perkeretaapian diharapkan mampu berperan sebagai simpul utama pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun sasaran kegiatan unit kerja Balai Pengujian Perkeretaapian ditetapkan :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik Balai Pengujian Perkeretaapian;
2. Meningkatnya kehandalan sarana perkeretaapian mendukung keselamatan transportasi perkeretaapian;
3. Meningkatnya kompetensi SDM perkeretaapian mendukung keselamatan transportasi perkeretaapian;
4. Meningkatnya kehandalan prasarana perkeretaapian mendukung keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian.

B. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran Balai Pengujian Perkeretaapian yaitu :

- 1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Balai Pengujian Perkeretaapian**
 - a. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian.
- 2. Meningkatkan Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi**
 - a. Peningkatan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian;
 - b. Pengembangan Sistem Pengujian Sarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi;
 - c. Peningkatan Fasilitas Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian yang Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi;
 - d. Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian.
- 3. Meningkatkan Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi**
 - a. Peningkatan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian;
 - b. Pengembangan Sistem Pengujian SDM Perkeretaapian Berbasis Teknologi;
 - c. Peningkatan Fasilitas Peralatan Pengujian SDM Perkeretaapian yang Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi;
 - d. Perawatan Peralatan Pengujian SDM Perkeretaapian.
- 4. Meningkatkan Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi**
 - a. Peningkatan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian;
 - b. Pengembangan Sistem Pengujian Prasarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi;
 - c. Peningkatan Fasilitas Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian yang Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi;
 - d. Perawatan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian.
- 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian**
 - a. Peningkatan Pencapaian Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian;
 - b. Peningkatan Pencapaian Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian;
 - c. Peningkatan Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian;

- d. Peningkatan Pencapaian Realisasi PNBPN Balai Pengujian Perkeretaapian;
- e. Peningkatan Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian;
- f. Peningkatan Pengelolaan BMN di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian;
- g. Peningkatan Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Balai Pengujian Perkeretaapian;
- h. Peningkatan Pengawasan Intern di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian.

C. Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi pada rancangan Rencana Strategis telah dikonsepsikan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai tolok ukur keberhasilan sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pengujian Perkeretaapian	a	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	96,50	96,75	97,00	97,25	97,50
Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	b	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	19,760	39,584	59,575	79,714	100,000
Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	c	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	%	19,542	34,448	53,529	79,663	100,000

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	d	Persentase Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	18,284	39,067	58,986	79,207	100,000
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian	e	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	80,35	80,40	80,45	80,50	80,55
	f	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	%	16,000	16,000	16,000	17,000	17,000
	g	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	81,000	81,500	82,000	82,500	83,000
	h	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	i	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	76,500	76,600	76,700	76,800	76,900

Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian tersebut telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* (SMART) dengan uraian analisa sebagai berikut :

Tabel 2.2 Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																													
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																									
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur nilai kepuasan pengguna layanan pengujian perkeretaapian	<p>Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari aplikasi 3AS Case Survey Management System Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :</p> <p>IKM = SKM Unit Pelayanan x 25</p> <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> <p>Sumber: Sumber: Permenpan14 tahun 2017</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sama serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan core business / tugas dan fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian mendukung sasaran program meningkatnya kinerja pelayanan publik bidang pengujian perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																										
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																										
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																										
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																										
Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan pengujian kelaikan sarana perkeretaapian dalam periode Rencana Strategis 2025-2029	<p>Jumlah pengujian sarana perkeretaapian periode Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah pengujian sarana perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis</p> <p>$\frac{\text{Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian}}{\text{Jumlah Target Pengujian Sarana Perkeretaapian}} = \frac{\text{Jumlah Capaian Pengujian Sarana Perkeretaapian Periode Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Pengujian Sarana Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 Sesuai Dokumen Renstra}}$</p>	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sama serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan core business / tugas dan fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian mendukung sasaran program meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029																									

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	<i>SPECIFIC (S)</i>	<i>MEASURABLE (M)</i>	<i>ACHIEVABLE (A)</i>	<i>RELEVANT (R)</i>	<i>TIME-BOUND (T)</i>
Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan pengujian kompetensi SDM perkeretaapian dalam periode Rencana Strategis 2025-2029	<p>Jumlah pengujian SDM perkeretaapian periode Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah pengujian SDM perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis</p> $\text{Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Capaian Pengujian SDM Perkeretaapian Periode Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Pengujian SDM Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 Sesuai Dokumen Renstra}}$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sama serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian mendukung sasaran program meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan pengujian kelaikan prasarana perkeretaapian dalam periode Rencana Strategis 2025-2029	<p>Jumlah pengujian prasarana perkeretaapian periode Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah pengujian prasarana perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis</p> $\text{Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Capaian Pengujian Prasarana Perkeretaapian Periode Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Pengujian Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 Sesuai Dokumen Renstra}}$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sama serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian mendukung sasaran program meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Merupakan Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP/Tim Evaluasi Internal (Nilai skala 1-100)	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Tim APIP/Tim Evaluasi Internal terhadap Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Balai Pengujian Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	<i>SPECIFIC (S)</i>	<i>MEASURABLE (M)</i>	<i>ACHIEVABLE (A)</i>	<i>RELEVANT (R)</i>	<i>TIME-BOUND (T)</i>
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat Penerapan Manajemen Risiko	Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko skala 0-30 dengan kategori Level 1-5 mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan rumusan tertentu dan nilainya diperoleh pada <i>Dashboard</i> Monev Kemenkeu Unit Kerja (skala 0-100%)	<p>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Pengujian Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi Monev Kemenkeu. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik; • 80 - 90 : Kategori Baik; • 60 - 80 : Kategori Cukup; • 50 - 60 : Kategori Kurang; • Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang. 	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / Tugas dan fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian (Rupiah) pada unit kerja Balai Pengujian Perkeretaapian sesuai target tahunan	Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian unit kerja Balai Pengujian Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian unit kerja Balai Pengujian Perkeretaapian pada tahun berjalan.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / Tugas dan fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	<i>SPECIFIC (S)</i>	<i>MEASURABLE (M)</i>	<i>ACHIEVABLE (A)</i>	<i>RELEVANT (R)</i>	<i>TIME-BOUND (T)</i>
		$\text{Persentase Realisasi PNBPNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBPNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBPNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$			
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pengelolaan arsip dalam suatu organisasi	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

D. Program dan Kegiatan

Berdasarkan rancangan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, Balai Pengujian Perkeretaapian melaksanakan kegiatan pada Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi dengan tolok ukur Indikator Kinerja unit kerja. Secara rinci uraian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian;
2. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian;
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian;
4. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian; dan
5. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian.

Adapun kerangka pendanaan Balai Pengujian Perkeretaapian sebagaimana dokumen Rencana Strategis Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029, diuraikan sebagai berikut :

1. Tahun 2025 : Rp90.852.717.000,00
2. Tahun 2026 : Rp109.475.447.000,00
3. Tahun 2027 : Rp102.039.297.000,00
4. Tahun 2028 : Rp103.891.189.000,00
5. Tahun 2029 : Rp98.760.120.000,00

BAB III

RENCANA KINERJA

BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

A. Pengukuran Indikator Kinerja

Indikator kinerja kegiatan mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2025 – 2029. Adapun tata cara pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.1 Perhitungan Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pengukuran																									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	<p>Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari aplikasi 3AS Case Survey Management System.</p> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :</p> <p>IKM = SKM Unit Pelayanan x 25</p> <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> <p>Sumber: Sumber: Permenpan14 tahun 2017</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																							
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																							
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																							
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																							
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																							
2	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	<p>Perhitungan target IKK Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang perhitungannya didapatkan dari target tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2029 yang merupakan total target pengujian sarana perkeretaapian dari tahun 2025-2029. Perhitungan target tahun 2025 dapat dilihat pada uraian dibawah ini :</p> <p>Target Tahun 2025 = $\frac{\text{Target Tahun 2025}}{\text{Target Renstra Tahun 2025 s.d 2029}}$</p>																									
3	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	<p>Perhitungan target IKK Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang perhitungannya didapatkan dari target tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2029 yang merupakan total target pengujian SDM perkeretaapian dari tahun 2025-2029. Perhitungan target tahun 2025 dapat dilihat pada uraian dibawah ini :</p> <p>Target Tahun 2025 = $\frac{\text{Target Tahun 2025}}{\text{Target Renstra Tahun 2025 s.d 2029}}$</p>																									

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pengukuran																		
4	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	<p>Perhitungan target IKK Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang perhitungannya didapatkan dari target tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2029 yang merupakan total target pengujian prasarana perkeretaapian dari tahun 2025-2029. Perhitungan target tahun 2025 dapat dilihat pada uraian dibawah ini :</p> $\text{Target Tahun 2025} = \frac{\text{Target Tahun 2025}}{\text{Target Renstra Tahun 2025 s.d 2029}}$																		
5	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	<p>Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai Skala 1 – 100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I mengacu pada KM 74 Tahun 2024</p> <p>Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian = (Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x 15%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%)</p>																		
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	<p>Penilaian Tingkat Manajemen Risiko (1-30) mengacu pada Peraturan ITJEN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan</p> <p>Total Skor MR = Total P1 s.d P15</p> $\sum \text{Total per Parameter} = \frac{\text{Jumlah hasil pengukuran}}{\text{Jumlah Teknik pengumpulan data}}$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Total Skor MR</th><th>Level</th><th>Kondisi MR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 7</td><td>Initial</td><td>Belum ada MR Formal</td></tr> <tr> <td>8 – 14</td><td>Repeatable</td><td>Parsial (Scattered Silo), Belum memadai</td></tr> <tr> <td>15 – 20</td><td>Defined</td><td>Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan, Implementasi MR kurang integrative</td></tr> <tr> <td>21 – 25</td><td>Managed</td><td>MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi</td></tr> <tr> <td>26 – 30</td><td>Optimised</td><td>Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola dengan baik</td></tr> </tbody> </table>	Total Skor MR	Level	Kondisi MR	0 – 7	Initial	Belum ada MR Formal	8 – 14	Repeatable	Parsial (Scattered Silo), Belum memadai	15 – 20	Defined	Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan, Implementasi MR kurang integrative	21 – 25	Managed	MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi	26 – 30	Optimised	Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola dengan baik
Total Skor MR	Level	Kondisi MR																		
0 – 7	Initial	Belum ada MR Formal																		
8 – 14	Repeatable	Parsial (Scattered Silo), Belum memadai																		
15 – 20	Defined	Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan, Implementasi MR kurang integrative																		
21 – 25	Managed	MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi																		
26 – 30	Optimised	Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola dengan baik																		
7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Pengujian Perkeretaapian (skala 0 – 100%) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi Monev Kemenkeu. Persentase Nilai Kinerja Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik • 80% - 90% : Kategori Baik • 60% - 80% : Kategori Cukup • 50% - 60% : Kategori Kurang • Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang 																		

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pengukuran
8	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	<p>Realisasi perolehan PNBP Balai Pengujian Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan.</p> $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	<p>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan yang kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.</p> <p>Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada 2 unit penilaian yakni Unit Pengolah (UP) dan Unit Kearsipan (UK) dan penilaian dilakukan pada 2 aspek penilaian dengan bobot pada masing-masing unit sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit Pengolah (UP) <ul style="list-style-type: none"> ○ Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) ○ Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 30%) • Unit Kearsipan (UK) <ul style="list-style-type: none"> ○ Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 60%) ○ Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 40%) $\text{Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Nilai Unit Pengolah Kearsipan} + \text{Nilai Unit Kearsipan}}{2} \times 100\%$ <p>Adapun kategorisasi nilai hasil pengawasan kearsipan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • > 90 – 100 : kategori AA (sangat memuaskan); • > 80 – 90 : kategori A (memuaskan); • > 70 – 80 : kategori BB (sangat baik); • > 60 – 70 : kategori B (baik); • > 50 – 60 : kategori CC (cukup); • > 30 – 50 : kategori C (kurang); • 0 – 30 : kategori D (sangat kurang).

B. Target Perjanjian Kinerja

Target Perjanjian Kinerja ditetapkan mengacu pada rancangan Rencana Strategis, memperhatikan capaian periode sebelumnya dan perkembangan kebijakan, program/kegiatan serta sumber daya yang tersedia pada Tahun 2025. Adapun target kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perjanjian Kinerja berdasarkan Target Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026

NO	SASARAN PROGRAM DITJEN PERKERETAAPIAN	SASARAN KEGIATAN BALAI PENGUJIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	VOL
1	2	3	4		5	6
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pengujian Perkeretaapian	a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	96,75
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	b.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	39,58
		Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	c.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	%	36,01
		Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	d.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	39,07
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian	e.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	82,15
			f.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	16,00
			g.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	94,29
			h.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	%	100,00
			i.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	79,45

Uraian target pada Perjanjian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2026 diuraikan pada Tabel berikut :

Indikator Kinerja		Satuan	Target Renstra 2026	Baseline 2025	Target PK 2026	Keterangan
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	96,75	3,840 (konversi 96,00)	96,75	<ul style="list-style-type: none"> • IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian memperoleh realisasi tahun 2025 sebesar 3,840 (konversi 96,00) dari target tahun 2025 sebesar 3,86 (konversi 96,50); • Target IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian tahun 2026 telah sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB) Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029.
2.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	39,58	20,61	39,58	<ul style="list-style-type: none"> • IKK Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian memperoleh realisasi tahun 2025 sebesar 20,61% (13.836 Unit) dari target tahun 2025 sebesar 19,76% (13.268 Unit); • Target IKK Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian tahun 2026 telah sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB) Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029 yaitu 39,58% atau 26.579 Unit dari target Renstra 2025-2029 sebesar 67.146 Unit.
3.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	%	34,45	21,33	36,01	<ul style="list-style-type: none"> • IKK Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian memperoleh realisasi tahun 2025 sebesar 21,33% (9.310 Orang) dari target tahun 2025 sebesar 19,54% (8.528 Orang); • Target IKK Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian tahun 2026 berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB) Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029 adalah 34,45% (15.033 Orang) dari target Renstra 2025-2029 sebesar 43.640 Orang; • Target yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 adalah sebesar 36,01% (15.716 Orang) dari target Renstra 2025-2029 sebesar 43.640 Orang; • Target PK tahun 2026 berbeda dengan Dokumen Renstra dikarenakan adanya rencana usulan pengujian baru sesuai hasil sinkronisasi dengan pihak pemohon.

Indikator Kinerja		Satuan	Target Renstra 2026	Baseline 2025	Target PK 2026	Keterangan
4.	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	39,07	21,04	39,07	<ul style="list-style-type: none"> IKK Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian memperoleh realisasi tahun 2025 sebesar 21,04% (287 Unit dan 421,945 km'sp) dari target tahun 2025 sebesar 19,28% (285 Unit dan 360 km'sp); Target IKK Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian tahun 2026 telah sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB) Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029 yaitu 39,07% atau 585 Unit dan 720 km'sp dari target Renstra 2025-2029 sebesar 1.504 Unit dan 1.835 km'sp.
5.	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	%	80,40	82,15	82,15	<ul style="list-style-type: none"> IKK Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Pengujian Perkeretaapian memperoleh realisasi sebesar 82,15 dari target tahun 2025 sebesar 80,35; Target IKK Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB) Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029 adalah 80,40, akan tetapi dengan <i>baseline</i> tahun 2025 sebesar 82,15 sehingga target PK Tahun 2026 disamakan dengan <i>baseline</i> tersebut.
6.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	%	16,00	16,00	16,00	<ul style="list-style-type: none"> IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian memperoleh realisasi tahun 2025 sebesar 16,00, dari target tahun 2025 sebesar 16,00; Target IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026 telah sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB) Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029 yaitu 16,00.
7.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	81,50	94,29	94,29	<ul style="list-style-type: none"> IKK Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian memperoleh realisasi sebesar 94,29 dari target tahun 2025 sebesar 81,00; Target IKK Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 telah sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB) Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029 adalah 94,29 yang disamakan dengan <i>baseline</i> realisasi tahun 2025.

Indikator Kinerja		Satuan	Target Renstra 2026	Baseline 2025	Target PK 2026	Keterangan
8.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	%	100,00	99,54	100,00	<ul style="list-style-type: none"> • IKK Persentase Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian memperoleh realisasi tahun 2025 sebesar 99,54% dari target tahun 2025 sebesar 100,00%; • Target Persentase Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026 telah sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB) Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029 yaitu 100,00%.
9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	76,60	79,45	79,45	<ul style="list-style-type: none"> • IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian memperoleh realisasi tahun 2025 sebesar 79,45 dari target tahun 2025 sebesar 76,60; • Target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026 telah sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB) Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029 yaitu 79,45 yang disamakan dengan <i>baseline</i> realisasi tahun 2025.

C. Alokasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026 No.SP.DIPA-022.08.1.467385/2026 yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2025, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp118.680.466.000,00.

Terdapat penyesuaian signifikan akibat kebijakan efisiensi belanja dan pemblokiran anggaran yang diterapkan secara nasional. Dampaknya, Balai Pengujian Perkeretaapian mengalami pemblokiran serta efisiensi anggaran sebesar Rp11.442.358.000,00 yang berdampak langsung terhadap mayoritas kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Kebijakan efisiensi tersebut mengakibatkan pembatalan pelaksanaan sejumlah kegiatan kontraktual, termasuk kegiatan dukungan manajemen. Selain itu, terdapat pula pembatasan pelaksanaan kegiatan swakelola/rutin yang berdampak pada aktivitas administratif dan operasional sehari-hari. Dengan demikian, alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan (pagu efektif) oleh Balai Pengujian Perkeretaapian sebesar Rp107.238.108.000,00.

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Efektif (Rp)
1.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	52.179.126.000	46.624.329.000
2.	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	21.857.483.000	21.615.091.000
3.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	42.974.469.000	38.040.034.000
4.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	666.000.000	433.200.000
5.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	1.003.388.000	525.454.000
Jumlah		118.680.466.000	107.238.108.000

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Pagu Awal (Rp)	Pagu Efektif (Rp)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pengujian Perkeretaapian	a	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	96,75	1.003.388.000	525.454.000
Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	b	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	39,58	28.745.450.000	27.039.254.000
Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	c	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	36,01	21.209.970.000	19.430.248.000

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Pagu Awal (Rp)	Pagu Efektif (Rp)
Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	d	Persentase Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	39,067	18.627.487.000	16.558.608.000
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian	e	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	82,15	689.957.000	325.038.000
	f	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	16,00	689.957.000	316.712.000
	g	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	94,29	45.773.814.000	41.937.991.000
	h	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	100,00	1.037.700.000	548.076.000
	i	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	79,45	902.743.000	556.727.000
Jumlah				118.680.466.000	107.238.108.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun anggaran 2022 berdasarkan Sasaran kegiatan terdiri dari 5 (Lima) sasaran utama untuk Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pengujian Perkeretaapian, Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian, Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian, Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian.

Dengan program utama tersebut diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan Balai Pengujian Perkeretaapian untuk terwujudnya penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang selamat, aman, dan handal sesuai yang tertuang dalam visi dan misi Balai Pengujian Perkeretaapian. Demikian rencana kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian yang akan dilaksanakan dan dijadikan sebagai Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Rencana kinerja ini secara lengkap tertuang dalam lampiran matrik Perjanjian Kinerja 2025.

LAMPIRAN A
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik di Bidang Pengujian Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai
2	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%
3	Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	%
4	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	%
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai

Bekasi, Januari 2026
KEPALA BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN,



RONALD JACKSON SIMBOLON, ST., MT.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197903032005021002

LAMPIRAN B
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik di Bidang Pengujian Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	96,75
2	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	39,58
3	Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	%	36,01
4	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	39,07
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	82,15
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	16,00
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	94,29
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	%	100,00
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	79,45

PROGRAM DAN KEGIATAN

	ANGGARAN EFEKTIF
1. PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS	Rp. 68.239.420.000
a. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp. 46.624.329.000
b. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp. 21.615.091.000
2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Rp. 38.998.688.000
a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp. 38.040.034.000
b. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp. 433.200.000
c. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp. 525.454.000
TOTAL	Rp. 107.238.108.000

Disetujui,

Jakarta, Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

KEPALA BALAI PENGUJIAN
PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023



RONALD JACKSON SIMBOLON
NIP 197903032005021002

LAMPIRAN C
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN PROGRAM DITJEN PERKERETAAPIAN	SASARAN KEGIATAN BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN (%)												ANGGARAN EFEKTIF (Rupiah)	PENANGGUNG JAWAB		
							Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12				
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Bidang Pengujian Perkeretaapian	A. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	96,75	Pemenuhan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	525.454.000	Sub Bagian Tata Usaha		
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	B. Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	39,58	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	20,75%	21,50%	22,07%	23,18%	23,93%	25,42%	27,65%	30,60%	32,83%	35,81%	38,49%	39,58%	27.039.254.000	Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian			
			Unit	26.579	1. Pengujian Sarana Perkeretaapian	13936	14436	14816	15566	16066	17066	18566	20547	22047	24047	25847	26579	7.565.730.000				
						8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%					
			%	100	2. Pengadaan Peralatan Pengujian/Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4.263.524.000		
						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
			%	100	3. Perawatan, Perbaikan dan Kalibrasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	0	0	0	15	15	40	40	75	75	95	95	100	6.214.000.000				
						0%	0%	0%	15%	15%	40%	40%	75%	75%	95%	100%	100%					
			%	100	4. Kegiatan Perawatan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4.640.000.000		
						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
			%	100	5. Kegiatan Pengoperasionalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4.356.000.000		
						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
			Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	C. Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	%	36,01	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	21,98%	22,50%	22,96%	24,38%	26,04%	28,32%	30,53%	32,21%	33,79%	34,79%	35,36%		36,01%	19.430.248.000	Seksi Pengujian SDM Perkeretaapian
					Orang	15.716	1. Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	9592	9820	10021	10638	11363	12361	13323	14058	14745	15181	15431		15716	15.679.312.000	
								8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%		100%		
					%	100	2. Pengadaan Peralatan Pengujian SDM Perkeretaapian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2.557.155.000	
								0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%		
					%	100	3. Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas Pengujian SDM Perkeretaapian	0	0	0	15	15	40	40	75	75	95	95		100	1.193.781.000	
			0%	0%				0%	15%	15%	40%	40%	75%	75%	95%	95%	100%					
	Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	D. Persentase Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	39,07	Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	21,64%	22,55%	23,16%	24,69%	26,59%	28,54%	30,49%	32,47%	34,32%	36,16%	37,67%	39,07%	16.558.608.000	Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian			
			Unit	585	1. Pengujian Prasarana Perkeretaapian	297	312	322	342	372	402	432	467	502	537	562	585	7.033.469.000				
						431,95	446,945	456,945	488,945	521,945	556,945	591,945	621,945	646,945	671,945	696,945	720					
						8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%					
			%	100	2. Pengadaan Peralatan Pengujian/Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.128.700.000				
						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
			%	100	3. Perawatan, Perbaikan dan Kalibrasi Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	0	0	0	15	15	40	40	75	75	95	95	100	5.396.439.000				
						0%	0%	0%	15%	15%	40%	40%	75%	75%	95%	95%	100%					

			E. Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	82,15	Pemenuhan Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,15	325.038.000		
			F. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	16,00	Pemenuhan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	316.712.000		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian	G. Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian		Nilai	94,29	Pemenuhan Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	0,00%	0,00%	49,00%	49,50%	50,00%	50,50%	51,00%	51,50%	51,87%	51,90%	60,00%	94,29%	41.937.991.000	Sub Bagian Tata Usaha
			Laporan	1	1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21.461.945.000	
						8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%			
			Laporan	1	2. Layanan Perkantoran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17.407.033.000	
						8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%			
			%	100	3. Layanan Sarana Internal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	-	
						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
			Laporan	12	4. Layanan Manajemen Keuangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.017.012.000	
						8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%			
			Laporan	1	5. Layanan Reformasi Kinerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.119.301.000	
						8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%			
			%	100	6. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	433.200.000	
						8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%			
			%	100	7. Sistem Informasi Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	499.500.000	
						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
			H. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	%	100,00	Pemenuhan Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	0,000	6,142	24,767	25,344	28,500	31,584	56,700	68,750	76,827	78,970	88,690	100,00	548.076.000	
			I. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	79,45	Pemenuhan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,45	556.727.000	
JUMLAH ANGGARAN																	107.238.108.000			

Bekasi, Januari 2026
KEPALA BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN


RONALD JACKSON SIMBOLON, ST., MT.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197903032005021002